

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**BPFK
MEDAN**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**BALAI PENGAMANAN FASILITAS
KESEHATAN (BPFK) MEDAN**

**TAHUN
2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPFK Medan tahun 2022 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPFK Medan. LAKIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik dan bersih (*Good Corporate and Clean Government*).

Penyusunan LAKIP BPFK Medan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi kinerja yang objektif, efisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana Strategi Bisnis BPFK Medan periode 2020-2024 yang kemudian pelaksanaan programnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang dirangkum menjadi LAKIP BPFK Medan dengan dukungan Anggaran DIPA Tahun 2022.

Demikian LAKIP ini kami susun sebagai informasi kinerja dan kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dari pembuatan LAKIP ini, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan laporan dimasa yang akan datang.

Medan, 31 Januari 2023
Kepala Balai,



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan garis besar dari rencana kinerja dan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan selama tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai berfungsi sebagai sarana mempertanggungjawabkan kinerja BPFK Medan kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan DIPA tahun 2022, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPFK Medan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.

Secara keseluruhan, output dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, dari aspek keuangan Realisasi anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan tahun 2022 adalah Rp. 18.869.837.188,- atau mencapai 79,82 % dari PAGU Anggaran sebesar Rp. 23.640.334.000,-. Dan untuk Realisasi pendapatan BPFK Medan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.240.595.041,- atau 117 % yang pencapaiannya melebihi dari targetnya sebesar Rp. 5.342.708.000,- yang ditargetkan di penetapan kinerja.

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BPFK Medan selama tahun 2022 memberikan hasil yang beragam, sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, pencapaian indikator yang telah ditetapkan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian indikator tahun 2022

No	IKU		PIC	Target	Realisasi
1	KPI.1	Realisasi anggaran	Ka. Subbag Adum	84 %	79,82%
2	KPI.2	Perolehan PNBP	Ka. Subbag Adum	Rp 5.342.708.000	Rp 6.240.595.041
3	KPI.3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	Koor. Sie. Tata Operasional	75 %	82,1 %
4	KPI.4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	Koor. Sie. Pelayanan Teknis	21.810	28.277
5	KPI.5	Kemitraan dengan Fasyankes	Koor. Sie. Tata Operasional	20	20
	KPI.6	Jumlah kerjasama dibidang pendidikan	Ka. Sie. Tata Operasional	3	3

6	KPI.7	Jumlah akreditasi	Koor. Sie Pelayanan Teknis	11	17
7	KPI.8	Jumlah pelaksanaan uji banding	Ka. Sie Tata Operasional	2	2
8	KPI.9	Pelaksanaan rekalisasi alat uji	Ka. Sie. Tata Operasional	81 %	81,7 %
9	KPI.10	Peningkatan Kompetensi SDM	Ka. Sie. Tata Operasional	47 %	47,8 %

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.4 Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, Misi dan Tata Nilai	13
2.2 Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Perbandingan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2021 dan 2020	20
3.3 Perbandingan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2022 dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (2020-2024)	22
3.4 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	23
3.5 Analisa Efisiensi Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUPAN	

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kinerja lainnya yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas BPFK Medan meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap komponen organisasi di BPFK Medan melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2022 yang wajib dipertanggungjawabkan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam

melakukan perbaikan dan perubahan baik dari sisi bisnis proses maupun manajemen, kemudian dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya.

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan proses penerapan sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis BPFK Medan periode 2020-2024.

BPFK Medan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. BPFK Medan didirikan pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara yang menetapkan Unit Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan dan Ujungpandang sesuai Nomor: 447/M.K.Waspan/10/1999. Dengan perkembangan yang makin pesat dalam bidang kesehatan kemudian Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2000 menetapkan Organisasi dan Tata Kerja BPFK berdasarkan Keputusan Nomor: 1164/Menkes/SK/VII/2000 dimana BPFK Jakarta dan Surabaya dengan type A

sedangkan BPFK Medan dan Makassar Type B. Dengan pertimbangan meningkatkan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pelayanan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi alat-alat kesehatan. Kemudian pada tahun 2007, Peraturan tersebut diperbaharui menjadi Permenkes RI Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Pada tanggal 22 November 2011 terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2351/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Terkait Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor. HK.02.02/I/4928/2017 tentang Izin Operasional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan dimana disebutkan bahwa BPFK Medan diberikan izin operasional dengan klasifikasi kelas A.

BPFK Medan memiliki 7 (tujuh) wilayah kerja yaitu, Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau, Propinsi Jambi, Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Bengkulu.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan ini disusun

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP BPFK Medan tahun 2022 adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan mengacu kepada RSB BPFK Medan periode 2020-2024;
2. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan selama tahun 2022;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan /kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan dimasa yang akan datang;
4. Untuk mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan sehingga tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan tugas Pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan yaitu melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan mempunyai fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- b. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- d. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
- e. Pengukuran luaran radiasi terapi;
- f. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan.

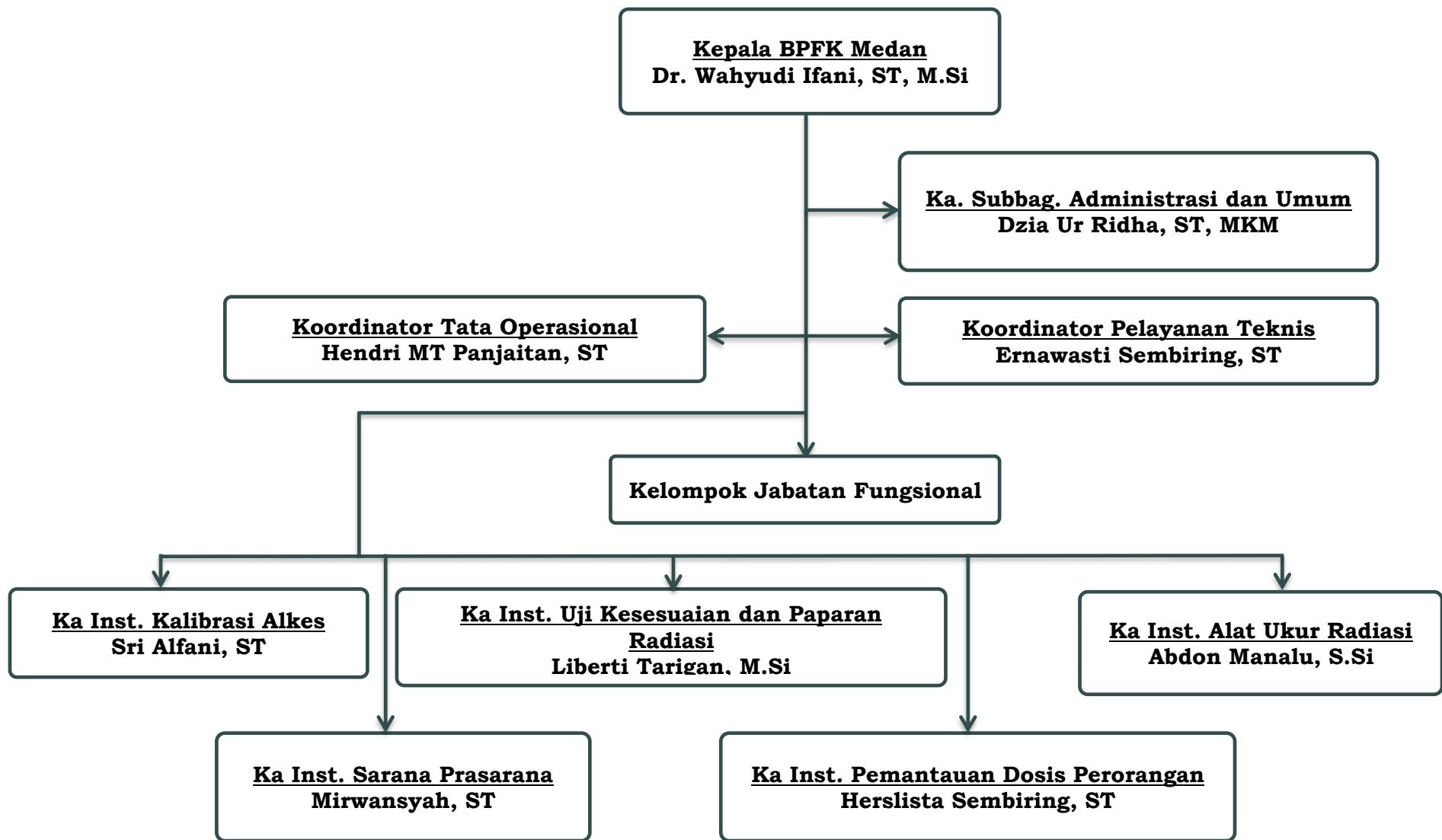
Struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPFK.
2. Koordinator Pelayanan Teknis merupakan unit nonstruktural yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi;
3. Koordinator Tata Operasional merupakan unit nonstruktural yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan

fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.4. Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (RSB) BPFK Medan periode 2020-2024 yang memiliki Visi “Menjadi institusi penguji, kalibrasi dan inspeksi fasilitas pelayanan kesehatan berstandar nasional dengan pelayanan prima”. Pada RSB periode ini terdapat misi yang dicanangkan yaitu:

1. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pengujian, kalibrasi dan inspeksi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar nasional;
2. Membangun kemitraan yang strategis dalam pengelolaan mutu alat kesehatan dan sarana di fasilitas kesehatan di wilayah kerja BPFK Medan;
3. Membangun tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga terwujud pertumbuhan finansial serta manajemen yang handal;
4. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional

Isu Strategis yang dihadapi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan di wilayah kerja BPFK Medan.

b. Penguatan Mutu dan kualitas laboratorium

Penguatan mutu dan kualitas laboratorium tahun 2022 antar lain dengan akreditasi ruang lingkup layanan serta peningkatan kemampuan dan keilmuan SDM BPFK Medan.

c. Kemitraan

Kemitraan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait dengan Bimbingan Teknis sarana prasarana Puskesmas. Demikian juga kemitraan dengan dunia Pendidikan terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPFK Medan dan perkembangan teknologi dibidang sarana dan prasarana Kesehatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPFK Medan tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian kinerja dibandingkan dengan kontrak kerja (penetapan kinerja) yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 serta dilakukan analisis dari setiap capainnya maka diharapkan dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat diidentifikasi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam Bab I menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, gambaran umum organisasi, serta sistematika penulisan pelaporan.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Dalam Bab II dijelaskan mengenai rencana strategi dan rencana kinerja. Pada bab ini juga disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2022 dalam rangka pencapaian visi dan misi BPFK Medan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab III diuraikan pengukuran kinerja, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang akan diambil.

BAB IV. Penutup

Dalam Bab IV mengemukakan simpulan menyeluruh dalam pencapaian kinerja BPFK Medan serta rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tata Nilai

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan pada LAKIP diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPFK Medan dalam indikator pelayanan mutu dan kualitas serta sumber daya yang ada, sehingga dapat memberikan informasi yang baik tentang capaian dan gambaran perkembangan kegiatan selama tahun 2022 yang mengacu kepada Renstra BPFK Medan periode 2020-2024 serta mewujudkan visi dan misi BPFK Medan.

Perencanaan kinerja BPFK Medan tahun 2022 dibuat berpedoman kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategi Bisnis BPFK Medan. Hal ini menjadi perhatian untuk memelihara kontinuitas dan sinkronisasi program dan kegiatan.

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan peranan BPFK Medan serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh BPFK Medan maka diperlukan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. BPFK Medan telah menetapkan visi dan misinya yaitu:

VISI

**” Menjadi institusi penguji,
kalibrasi dan inspeksi
fasilitas pelayanan
kesehatan berstandar
nasional dengan pelayanan
prima “**

MISI

- Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pengujian, kalibrasi dan inspeksi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar nasional;
- Membangun kemitraan yang strategis dalam pengelolaan mutu alat kesehatan dan sarana di fasilitas kesehatan di wilayah kerja BPFK Medan;
- Membangun tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga terwujud pertumbuhan finansial serta manajemen yang handal;
- Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Tata Nilai

Keberhasilan pencapaian visi dan misi perlu ditanamkan nilai-nilai agar pelaksanaan tugas berjalan lebih optimal sesuai dengan yang diinginkan. Nilai-nilai tersebut diantaranya:

1. Mutu = Menghasilkan kinerja yang terbaik untuk meningkatkan kualitas organisasi yang bermutu dan berkesinambungan
2. Integritas = Memiliki Kompetensi yang komprehensif dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
3. Terpadu = Seluruh komponen kelembagaan berkolaborasi satu sama lain
4. Responsif = Memberikan pelayanan yang responsif guna menciptakan layanan yang efektif dan efisien
5. Akuntabel = Mampu bertanggung jawab terhadap tindakan, perilaku, dan tugas baik dari segi proses maupun hasil

2.2. Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan pada target berdasarkan Indeks Kinerja Utama (IKU) yang menjadi pemacu kinerja. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu: perspektif finansial, perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Adapun target Indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yang telah ditetapkan bersama di lingkungan BPFK Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja periode 2020 – 2024

KPI	Indikator Kinerja	Bobot	Satuan	Target tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif Finansial								
1	Realisasi kinerja program	6	%	70	80	84	88	90
2	Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	6	Nilai LAKIP	87	89	91	93	95

3	Perolehan PNPB	5	Rp	3.900.000.000	4.707.692.000	5.342.708.000	6.050.800.000	6.700.000.000
Perspektif Stakeholders								
4	Kepuasan Pelanggan	5	%	70	72	74	76	78
5	Jumlah Rumah Sakit rujukan regional, provinsi dan nasional yang dilayani	6	%	50	50	50	75	75
6	Jumlah Puskesmas yang dilayani	6	%	10	10	12	13	15
Perspektif Proses Bisnis Internal								
7	Persentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti	4	%	70	70	75	75	80
8	Ketepatan pelayanan sesuai jadwal	4	%	60	63	65	68	70
9	Jumlah cakupan layanan	5	%	83	86	88	90	90
10	Jumlah SOP yang diperbaiki	3	Dokumen	5	5	5	5	5
11	Jumlah akreditasi	6	Ruang lingkup	1	1	1	1	1
12	Jumlah fasyankes yang dilayani	4	fasyankes	670	700	720	740	760
13	Jumlah pelayanan Kalibrasi	4	alat	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
14	Jumlah Pelayanan Uji Kesesuaian dan Paparan Radiasi	4	alat	684	700	740	790	820
15	Jumlah pelayanan sarana prasarana	4	layanan	5	10	15	20	25

16	Jumlah pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan	4	PDP	2.500	3.000	3.500	3.550	3.800
17	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	4	Sertifikat	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000
18	Kemitraan dengan dunia pendidikan	4	Jumlah	5	5	5	5	5
19	Temuan audit yang ditindaklanjuti	4	%	70	70	80	80	80
Perspektif Pengembangan Sumberdaya dan Organisasi								
20	Capaian SKP SDM	2	%	100	100	100	100	100
21	Jumlah alat ukur sesuai standar pelayanan	2	%	70	75	80	85	90
22	Ketepatan kalibrasi alat ukur standar sesuai jadwal	2	%	70	72	74	76	78
23	Integrasi ICT	2	%	50	55	60	65	70
24	Peningkatan Kompetensi SDM	2	%	40	45	50	55	60
25	Peningkatan Jumlah SDM	2	Orang	2	2	2	3	3

Dari target target Indikator kinerja selama kurun waktu 5 tahun (Tabel 2) yang telah ditetapkan bersama di atas, pada penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 oleh tim penilai terdapat Indikator yang belum berorientasi pada hasil (outcome) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dilakukan perubahan (revisi) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2022 – 2024 (Tabel 3) beserta targetnya sesuai dengan hasil keputusan rapat manajemen. Adapun target Indikator kinerja setelah revisi yang telah ditetapkan bersama di lingkungan BPFK Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Revisi Indikator Kinerja periode 2022 – 2024

KPI	Indikator Kinerja	Bobot	Satuan	Target Tahun		
				2022	2023	2024
Perspektif Finansial						
1	Realisasi kinerja program	12	%	84	86	88
2	Perolehan PNBP	12	Rp	5.342.708.000	4.036.214.000	4.444.758.000
Perspektif Stakeholders						
3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	9	%	75	77	79
Perspektif Proses Bisnis Internal						
4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	12	Layanan	21810	24020	26230
5	Kemitraan dengan Fasyankes	9	Fasyankes	20	25	30
6	Jumlah Kerjasama dibidang Pendidikan	9	Kerjasama	3	3	3
7	Jumlah akreditasi	11	Ruang lingkup	11	14	18
8	Jumlah pelaksanaan uji banding	8	Jumlah uji banding	2	2	2
Perspektif Pengembangan Sumberdaya dan Organisasi						
9	Pelaksanaan rekalibrasi alat uji	9	%	81	84	86
10	Peningkatan Kompetensi SDM	9	%	47	50	53

Dari target target Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tahun, kemudian ditetapkan Rencana Kerja. Rencana kerja tahun anggaran 2022 di bawah ini merupakan dasar bagi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja aktual. Rencana kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

No	Perspektif	Sasaran Strategis	IKU		Target
1	Finansial	Terwujudnya <i>cost Effectiveness</i>	1	Realisasi anggaran	84 %
2		Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	2	Perolehan PNB	Rp 5.342.708.000

3	Stakeholders	Terwujudnya Kepuasan Stakeholders	3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	75 %
4	Proses Bisnis Internal	Terwujudnya Pelayanan Prima	4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	21.810 Layanan
5		Terwujudnya Kemitraan Layanan	5	Kemitraan dengan Fasyankes	20 Fasyankes
			6	Jumlah Kerjasama dibidang Pendidikan	3 Kerjasama
6		Terwujudnya laboratorium yang berkualitas dengan standar nasional	7	Jumlah akreditasi	11 Ruang Lingkup
7		Terwujudnya Pemantauan Mutu Efekti (PME) yang Efektif	8	Pelaksanaan Uji Banding	2 Uji Banding
8	Pengembangan Sumber daya & Organisasi	Terwujudnya peningkatan keandalan sarana dan prasarana	9	Pelaksanaan Rekalibrasi Alat Uji	81 %
9		Terwujudnya peningkatan kompetensi dan jumlah SDM	10	Peningkatan Kompetensi SDM	47 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan pengukuran dan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan didalam rencana strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat pencapaian keberhasilan masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja juga dimaksud untuk mengetahui kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan TA 2022.

3.1. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 5 Perbandingan antara target dan realisasi TA 2022

No	IKU		PIC	Target	Realisasi
1	KPI.1	Realisasi Anggaran	Ka. Subbag. Adum	84 %	79,82 %
2	KPI.2	Perolehan PNB	Ka. Subbag. Adum	Rp 5.342.708.000	Rp 6.240.595.041
3	KPI.3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	Koor. Sie. Tata Operasional	75 %	82,1 %
4	KPI.4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	Koor. Sie. Pelayanan Teknis	21.810	28.277
5	KPI.5	Kemitraan dengan Fasyankes	Koor. Sie. Tata Operasional	20	20

	KPI.6	Jumlah kerjasama dibidang pendidikan	Ka. Sie. Tata Operasional	3	3
6	KPI.7	Jumlah akreditasi	Koor. Sie Pelayanan Teknis	11	17
7	KPI.8	Jumlah pelaksanaan uji banding	Ka. Sie Tata Operasional	2	2
8	KPI.9	Pelaksanaan rekalisasi alat uji	Ka. Sie. Tata Operasional	81 %	81,7 %
9	KPI.10	Peningkatan Kompetensi SDM	Ka. Sie. Tata Operasional	47 %	47,8 %

3.2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Tabel 6 Perbandingan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2021 dan 2020

No	IKU Awal		Realisasi 2020	Realisasi 2021	IKU Revisi		Realisasi 2022
1	KPI.1	Realisasi kinerja program	67%	80,89 %	KPI.1	Realisasi anggaran	79.82%
2	KPI.2	Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	87,47	51,30			
	KPI.3	Perolehan PNB	Rp 5.298.492.000	Rp 4.348.864.482	KPI.2	Perolehan PNB	Rp 6.240.595.041
3	KPI.4	Survei Kepuasan Pelanggan	79,6%	87,1 %	KPI.3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	82.1 %
	KPI.5	Jumlah Rumah Sakit rujukan regional, provinsi dan nasional yang dilayani	25%	33,33 %			
	KPI.6	Jumlah Puskesmas yang dilayani	22%	18.25 %			

4	KPI.7	Persentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti	100%	70 %			
	KPI.8	Ketepatan pelayanan sesuai jadwal	60%	63 %			
5	KPI.9	Jumlah cakupan layanan	106 cakupan	111 cakupan			
	KPI.10	Jumlah SOP yang diperbaiki	2 Dokumen	5 Dokumen			
	KPI.11	Jumlah akreditasi	1 Instalasi	5 R. lingkup	KPI.7	Jumlah akreditasi	11
6	KPI.12	Jumlah fasyankes yang dilayani	739 Fasyankes	622 Fasyankes			
	KPI.13	Jumlah pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	15.348 Alat	16.562 Alat	KPI. 4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	28.277
	KPI.14	Jumlah Pelayanan Uji Kesesuaian dan Paparan Radiasi	152 Alat	264 Alat			
	KPI.15	Jumlah pelayanan sarana prasarana	Tidak ada pelayanan	3 Pelayanan			
	KPI.16	Jumlah pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan	6.919 Pemantauan	4.826 Pemantauan			
	KPI.17	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	15.451 Lembar	16.829 Lembar			
	KPI.18	Kemitraan dengan dunia pendidikan	4 Kemitraan	3 Kemitraan	KPI. 6	Jumah kerjasama dibidang pendidikan	3
7	KPI.19	Temuan audit yang ditindaklanjuti	100%	80 %			
8	KPI.20	Capaian SKP SDM	100%	100 %			
9	KPI.21	Jumlah alat ukur sesuai standar pelayanan	49,6%	81,7 %			

	KPI.22	Ketepatan kalibrasi alat ukur standar sesuai jadwal	70 %	70 %	KPI.9	Pelaksanaan rekalisasi alat uji	81,7%
10	KPI.23	Integrasi ICT	25%	25 %			
11	KPI.24	Peningkatan Kompetensi SDM	57,9 %	46 %	KPI.10	Peningkatan Kompetensi SDM	47,8 %
	KPI. 25	Peningkatan Jumlah SDM	2 Orang	2 Orang			
12					KPI.5	Kemitraan dengan fasyankes	20
13					KPI.8	Jumlah pelaksanaan uji banding	2

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 oleh tim penilai terdapat Indikator yang belum berorientasi pada hasil (outcome) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga terdapat perubahan (revisi) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2022 beserta targetnya sesuai dengan hasil keputusan rapat manajemen. Adapun indikator yang dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 adalah indikator yang masih terdapat dalam indikator setelah revisi (tahun 2022). Salah satu indikator yang terbaru adalah jumlah kemampuan pelayanan yang merupakan gabungan dari indikator Jumlah pelayanan Pengujian dan Kalibrasi, Jumlah Pelayanan Uji Kesesuaian dan Paparan Radiasi, Jumlah pelayanan sarana prasarana dan Jumlah pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (2020-2024)

Tabel 7 Perbandingan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2022 dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (2020-2024)

No	IKU	Target Jangka Menengah	Realisasi 2022	Persentase Capaian
----	-----	------------------------	----------------	--------------------

1	KPI.1	Realisasi Anggaran	84 %	79,82 %	95,02 %
2	KPI.2	Perolehan PNBP	Rp 5.342.708.000	Rp 6.240.595.041	117%
3	KPI.3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	75 %	82,1 %	109,47 %
4	KPI.4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	21.810	28.277	129,65 %
5	KPI.5	Kemitraan dengan Fasyankes	20	20	100 %
	KPI.6	Jumlah kerjasama dibidang pendidikan	3	3	100 %
6	KPI.7	Jumlah akreditasi	11	17	155 %
7	KPI.8	Jumlah pelaksanaan uji banding	2	2	100 %
8	KPI.9	Pelaksanaan rekalisasi alat uji	81 %	81,7 %	100,86 %
9	KPI.10	Peningkatan Kompetensi SDM	47 %	47,8 %	101,70 %

3.4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 8 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	IKU		Program Kegiatan
1	Terwujudnya <i>cost Effectiveness</i>	1	Realisasi kinerja program	1. Pengadaan Alat Kalibrasi/ Pengujian/Sarpras 2. Pengadaan Inventaris Kantor 3. Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU 4. Layanan Kepegawaian satker UPT Vertikal 5. Gaji dan Tunjangan 6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	2	Perolehan PNBP	Penagihan Piutang
3	Terwujudnya Kepuasan <i>Stakeholders</i>	3	Tingkat Kepuasan Pelanggan	Survey Kepuasan Pelanggan
4	Terwujudnya Pelayanan Prima	4	Jumlah Kemampuan Pelayanan	Program pelayanan pengujian dan kalibrasi
				Program pelayanan uji kesesuaian dan paparan radiasi
				Program pelayanan sarana dan prasarana
				Program pelayanan pemantauan dosis perorangan
5	Terwujudnya Kemitraan Layanan	5	Kemitraan dengan Fasyankes	Bimtek Kalibrasi, UKPR, Sarpras, dan PDP
		6	Jumlah Kerjasama dibidang Pendidikan	Kerjasama dengan lembaga pendidikan
6	Terwujudnya laboratorium yang berkualitas dengan standar nasional	7	Jumlah akreditasi	Akreditasi ruang lingkup layanan
7	Terwujudnya Pemantauan Mutu Efektif (PME) yang Efektif	8	Pelaksanaan Uji Banding	Uji Banding Instalasi dan Lab UKPR/PDP/AUR/ Kalibrasi
8	Terwujudnya peningkatan keandalan sarana dan prasarana	9	Pelaksanaan Rekalibrasi Alat Uji	Rekalibrasi Alat Uji
9	Terwujudnya peningkatan	10	Peningkatan Kompetensi SDM	Pelatihan SDM

	kompetensi dan jumlah SDM			
--	---------------------------	--	--	--

1. Realisasi Kinerja Program

a. Pengadaan Alat Kalibrasi/Pengujian/Sarpras

Tabel 9 Analisa kegiatan realisasi renovasi/perbaikan gedung dan halaman

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Target	Realisasi
1	Pengadaan Alat Kalibrasi/Pengujian/ Sarpras	100%	86.08 %

Kegiatan pelaksanaan terdiri atas:

Tabel 10 Rincian analisa kegiatan Pengadaan Alat Kalibrasi/Pengujian/Sarpras

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Thermohygrometer BK Precision (4 unit)	48,928,000	45,998,400	94.01 %
2	Thermo-hygrometer, dewk, high accuracy set-2 (1 Unit)	200,340,000	156,121,500	77.93 %
3	IR calibrator, 152 mm (6in), -15 to 120c set-3 (1 Unit)	396,900,000	354,078,000	89.21 %
4	Infusion Device Analyzer (1 Unit)	334,509,000	290,000,000	86.69 %
5	SPO2 Analyzer (2 Unit)	138,369,000	121,185,360	87.58 %
6	Phantom A Body Head CT-Scan (1 Unit)	115,500,000	98,076,825	84.92 %
7	Lux Meter (3 Unit)	71,040,000	60,803,136	85.59 %
8	Multi channel data logger complete set (1 Unit)	126,475,000	125,625,360	99.33 %
9	mA/mAs meter digital (1 Unit)	198,429,000	41,834,790	21.08 %
10	TLD Reader BARC 1010A (1 Unit)	1,603,538,000	1,489,620,000	92.90 %

11	Single laser infrared thermometer _ 10:1 spot (1unit)	4,900,000	4,698,630	95.89 %
----	--	-----------	-----------	---------

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yaitu 17 unit. Namun pada saat pelaksanaannya terjadi perubahan harga alat, sehingga capaian realisasi anggarannya sebesar 86.08%.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Seluruh alat Kalibrasi/Pengujian/Sarpras yang dianggarkan untuk dibeli, terdapat penurunan harga di setiap unitnya. Sehingga menyebabkan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja modal.

b. Pengadaan Inventaris Kantor

Tabel 11 Analisa pengadaan inventaris kantor

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Target	Realisasi
1	Pengadaan inventaris kantor	100%	100%

Kegiatan pelaksanaan terdiri atas:

Tabel 12 Rincian analisa pengadaan inventaris kantor

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	AC 1,5 PK (1 Unit)	4.111.000	4.111.000	100%

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Pengadaan inventaris kantor dilakukan secara pembelian langsung dan sesuai dengan perencanaan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:
Perencanaan anggaran pada pengadaan inventaris kantor telah sesuai dengan realisasi anggaran. Hal ini merupakan efisiensi yaitu tepat guna dalam penggunaan sumber daya anggaran.

c. Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU

Tabel 13 operasional dan pemeliharaan UPT Non BLU

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Target	Realisasi
1	Operasional dan pemeliharaan UPT Non BLU	100%	72.68%

Kegiatan pelaksanaan terdiri atas:

Tabel 14 Rincian analisa operasional dan pemeliharaan UPT Non BLU

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Uji Profesiensi Lab	193,672,000	183,303,490	94.65 %
2	Penagihan/Tindak Lanjut LHP/Sosialisasi Simponi (Tahap I dan Tahap II)	166,800,000	147,204,400	88.25 %
3	Banch Marking Manajemen dan Administrasi	89,040,000	65,759,884	73.85 %
4	Pendampingan Rekalibrasi Alat Kalibrasi/Pengujian/Sarpras Tahap I dan II	132,816,000	110,835,011	83.45 %
5	Survey Kepuasan dan Asessmen Keluhan Pelanggan Pelayanan Pengujian, Kalibrasi Inspeksi	236,100,000	232,585,447	98.51 %
6	Pelayanan Kalibrasi Alat Medik Puskesmas Daerah Tertinggal/ Perbatasan/Kepulauan Terpencil (Riau dan Sumbar)	134,400,000	74,078,332	55.12 %
7	Uji Banding Instalasi dan Lab UKPR/PDP/AUR	122,700,000	84,549,402	68.91 %
8	Uji Banding Instalasi dan Lab Kalibrasi	127,128,000	82,264,799	64.71 %
9	Uji Banding Instalasi dan lab Sarpras	45,470,000	12,124,000	26.66 %

10	Interkomparasi	159,384,000	80,526,050	50.52 %
11	Bimtek Sarpras	332,422,000	195,892,697	58.93 %
12	Konsultasi ke Kementerian Kesehatan	228,400,000	166,644,831	72.96 %
13	Kaji Ulang Manajemen Pembahasan Metode Kerja Pegujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (MK Perdirjen) tahun 2022	302,008,000	271,448,086	89.88 %
14	Konsultasi ke Instansi di luar KEMENKES RI	137,024,000	74,651,791	54.48 %
15	Hari Kesehatan Nasional	54,384,000	42,861,192	78.81 %
16	Kaji Ulang Manajemen dan Audit Dokumen Mutu Internal	75,829,000	63,776,103	84.11 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Sebagian besar program kegiatan telah terealisasi sehingga terdapat penyerapan anggaran sebesar 72,68%.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Seluruh kegiatan telah terlaksana, secara realisasi anggaran sesuai dengan volume kegiatan yang direncanakan. Namun, pada implementasinya secara anggaran terdapat sisa anggaran.

d. Layanan Kepegawaian satker UPT Vertikal

Tabel 15 Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Target	Realisasi
1	Layanan Kepegawaian satker UPT Vertikal	100%	54.40 %

Kegiatan pelaksanaan terdiri atas:

Tabel 16 Rincian analisa Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelatihan Kalibrasi (Lab Suhu dan Volume Gaya Massa)	90,484,000	19,653,500	21.72 %
2	Pelatihan Kalibrasi (Lab Tekanan dan Kelistrikan)	109,386,000	85,579,150	78.24 %
3	Pelatihan Instalasi Sarana Prasarana (Gas Medis, Tata Udara, Perancangan tata udara ruang, dsb)	151,368,000	58,185,411	38.44 %
4	Pelatihan Manajemen dan Mutu Lab TOP dan Yantek (ISO/IEC/Leadership/Business developement/Pelayanan Pelanggan)	271,790,000	168,872,384	62.13 %
5	Pelatihan Instalasi UKPR (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)	220,880,000	132,775,701	60.11 %
6	Pelatihan Instalasi PDP (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)	226,000,000	201,902,051	89.34 %
7	Pelatihan Instalasi AUR (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)	147,320,000	32,190,000	21.85 %
8	Pelatihan Kepegawaian/Keuangan/Perencanaan/ICT/BMN/Arsiparis	307,580,000	80,795,820	26.27 %
9	Rekualifikasi PPR Tingkat I dan II	38,242,000	3,100,000	8.11 %
10	Pelatihan Sie Pelayanan Teknis (Marketing/Pelayanan Pelanggan/	74,124,000	8,150,000	11.00 %

	business developement,dsb) on line dan off line			
11	Pelatihan Pengujian Uji Produk	111,784,000	89,387,088	79.96 %
12	Pelatihan dan sertifikasi Tingkat Inspektorat IGVM	79,896,000	80,819,095	101.16 %
13	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	47,004,000	84,965,273	180.76 %
14	Uji Kompetensi Kalibrasi	48,224,000	34,899,406	72.37 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Sumber dana kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Layanan Kepegawaian satker UPT Vertikal diambil dari anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPFK Medan, dimana sebagian besar anggaran tersebut terkumpul pada pertengahan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Dimana pada pertengahan sampai akhir tahun, kegiatan pelayanan ke fasilitas pelayanan kesehatan sangat padat, sehingga realisasi kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi sesuai perencanaan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Terdapat beberapa kegiatan yang biaya kegiatannya lebih rendah dari pagu anggaran pelatihan, sehingga telah dilakukan efisiensi dalam kegiatan tersebut.

e. Gaji dan Tunjangan

Tabel 17 Analisa gaji dan tunjangan

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Gaji dan Tunjangan	8,564,758,000	7,999,945,108	93.41 %

Kegiatan pelaksanaan terdiri atas:

Tabel 18 Rincian Analisa gaji dan tunjangan

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2,972,603,000	2,785,835,415	93.72 %
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46,000	35,733	77.68 %
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	177,000,000	184,236,120	104.09 %
4	Belanja Tunj. Anak PNS	73,711,000	65,119,514	88.34 %
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	26,200,000	23,400,000	89.31 %
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	241,389,000	51,585,000	21.37 %
7	Belanja Tunj. PPh PNS	11,751,000	9,044,828	76.97 %
8	Belanja Tunj. Beras PNS	187,539,000	163,234,680	87.04 %
9	Belanja Uang Makan PNS	462,603,000	344,613,000	74.49 %
10	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	670,000,000	732,041,193	109.26 %
11	Belanja Uang Lembur	18,800,000	0	0 %
12	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,552,296,000	3,522,739,625	99.17 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Pada poin 11 terkait belanja uang lembur, tidak terlaksana.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Perencanaan anggaran pada gaji dan tunjangan telah sesuai dengan realisasi anggaran. Hal ini merupakan efisiensi yaitu tepat guna dalam penggunaan sumber daya anggaran.

f. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 19 Analisa Operasional dan Pemeliharaan Kantor

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Target	Realisasi
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	70.49 %

Kegiatan pelaksanaan terdiri atas:

Tabel 20 Rincian analisa Operasional dan Pemeliharaan Kantor

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Langganan Daya dan Jasa	1,342,045,000	870,965,633	64.90 %
2	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Bangunan Gedung Kantor	212.782.000	212,425,000	99.83 %
3	Belanja Pemeliharaan / Rekalibrasi/ Perbaikan Peralatan Kantor , Alat Uji, Kalibrasi dan Inspeksi	2,009,501,000	826,929,426	41.15 %
4	Belanja Pemeliharaan/Perawatan kendaraan Roda 2 dan Roda 4	216.120.000	194,576,874	90.03 %
5	Belanja Operasional Keperluan Perkantoran	1,147,150,000	1,059,465,150	92.36 %
6	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,149,650,000	1,079,303,750	93.88 %
7	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai/Resiko Pekerjaan	129,000,000	128,570,000	99.67 %
8	Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai	212,040,000	0	0 %
9	Pertemuan keuangan, perencanaan, kepegawaian, humas, arsiparis, ict, ketatausahaan, kerumahtanggaan	468,300,000	442,991,425	94.60 %
10	Perjalanan Dinas Pimpinan	282,024,000	257,595,407	91.34 %
11	Permohonan Akreditasi	43,528,000	26,992,520	62.01 %
12	Surveylen Akreditasi	34,216,000	8,314,500	24.30

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target. Pada poin 8 terkait penambah daya tahan tubuh pegawai, tidak terlaksana.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

2. Pendapatan PNB

Tabel 21 Analisa Pendapatan PNB

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penagihan Piutang PNB	166,800,000	147,204,400	88.25 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:

Terdapat Rp. 1.375.652.900 yang berhasil dihimpun dari kegiatan penagihan piutang baik yang penagihan langsung maupun melalui surat, telepon dan email dari total pendapatan PNB BPFK Medan Tahun 2022 sebesar Rp. 6.240.595.041 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Pendapatan PNB Perbulan

No.	Bulan	Jumlah Pendapatan
1	Januari	-
2	Februari	251.502.000
3	Maret	27.360.000
4	April	292.600.900
5	Mei	253.139.200
6	Juni	836.802.400
7	Juli	351.322.200
8	Agustus	402.054.120
9	September	430.847.400
10	Oktober	696.069.820
11	November	717.587.191
12	Desember	1.981.309.810
Total PNB 2022		6.240.595.041
Target PNB 2022		5.342.708.000
Capaian		117 %

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada penagihan piutang dimana anggaran yang digunakan untuk penagihan piutang lebih kecil dari piutang yang berhasil ditagih/diperoleh.

3. Indeks Kepuasan Pelanggan

Tabel 23 Analisa indeks kepuasan pelanggan

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Survey Kepuasan/Keluhan Pelanggan	236,100,000	232,585,447	98.51

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan tahun 2022 dilaksanakan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,1.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Secara anggaran, kegiatan ini telah terlaksana hampir 100%, yaitu 98,51%.

4. Jumlah Kemampuan Pelayanan

Tabel 24 Analisa jumlah kemampuan pelayanan

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	-	-	-	-

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Pada tahun 2022 kemampuan pelayanan BPFK Medan mencapai 28.277 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Pengujian dan Kalibrasi = 22828 Layanan
 - 2) Uji kesesuaian dan paparan radiasi = 444 Layanan
 - 3) Pemantauan dosis perorangan = 4989 Layanan

4) Inspeksi Sarana dan Prasarana = 16 Layanan

Terdapat beberapa pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan, karena permintaan pelayanannya diusulkan di akhir tahun.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran dari pihak konsumen sesuai dengan PP 64 Tahun 2019.

5. Kemitraan dengan Fasyankes

Tabel 25 Analisa kemitraan dengan fasyankes

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bimtek Kalibrasi	332,422,000	195,892,697	58.93

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:

Pada tahun 2022 kegiatan bimtek terkait pelayanan BPFK Medan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Bimtek pertama dilaksanakan di Batam pada tanggal 12 s/d 16 September. Terdapat 20 fasyankes yang terbina dalam pelaksanaan bimbingan teknis diatas.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Pada pelaksanaannya menggunakan anggaran sebesar 58,93% dari yang dianggarkan.

6. Kerjasama dengan lembaga Pendidikan

Tabel 26 Analisa Kerjasama dengan Lembaga pendidikan

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kerjasama dengan Lembaga pendidikan	-	-	-

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:

Pada tahun 2022, terdapat 3 kerja sama dengan lembaga pendidikan yaitu ATEM Sari Mutiara, ATEM Binalita Sudama, dan USU.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari kegiatan ini, tidak terdapat penggunaan anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPFK Medan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki serta SDM tenaga fungsional sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan.

7. Jumlah Akreditasi

Tabel 27 Analisa jumlah akreditasi

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Permohonan Akreditasi	43,528,000	26,992,520	62.01 %
2	Surveylen Akreditasi	34,216,000	8,314,500	24.30 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:

Terdapat 17 ruang lingkup layanan yang sudah terakreditasi hingga tahun 2022, diantara lain:

- Lab Pemantauan Dosis Perorangan TLD
- Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi Umum
- Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Dental
- Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Mammography
- Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Fluoroscopy
- Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X CT Scan
- Infusion Pump
- Sphygmomanometer
- Suction Pump
- Baby Inkubator
- Centrifuge
- Electrocardiograph
- Fetal Doppler
- Surveymeter
- Dosimeter Saku
- Instalasi Listrik Medis
- Instalasi Grounding Medis

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Kegiatan akreditasi dilaksanakan oleh SDM dari masing-masing instalasi laboratorium yaitu instalasi UKPR, Kalibrasi, AUR, dan Sarpras. Adapun penambahan ruang lingkup terbaru yaitu :
 1. CentrifugeElectrocardiograph
 2. Fetal Doppler
 3. Surveymeter
 4. Dosimeter Saku
 5. Instalasi Listrik Medis
 6. Instalasi Grounding Medis

8. Pelaksanaan Uji Banding

Tabel 28 Analisa pelaksanaan uji banding

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Uji Banding Instalasi dan Lab UKPR/PDP/AUR	122,700,000	84,549,402	68.91 %
2	Uji Banding Instalasi dan Lab Kalibrasi	127,128,000	82,264,799	64.71 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Pada tahun 2022 pelaksanaan uji banding dilakukan untuk 2 ruang lingkup yaitu Uji banding antar pesawat sinar-X CT Scan dan Uji banding antar pesawat sinar-X Fluroscopy, yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 1 – 5 Februari 2022
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:
Dari kegiatan ini, terdapat realisasi anggaran sebesar 64,71% dari anggaran yang tersedia. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPFK Medan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki serta SDM tenaga fungsional sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini.

9. Pelaksanaan Rekalibrasi Alat Uji

Tabel 29 Analisa Pelaksanaan Rekalibrasi Alat Uji

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendampingan Rekalibrasi Alat Kalibrasi/ Pengujian/ Sarpras	132,816,000	110,835,011	83.45
2	Pemeliharaan (Rekalibrasi) dan Perbaikan Alat Kalibrasi dan Pengujian Inspeksi	1,728,061,000	613,526,175	35.50

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:

Rekalibrasi alat ukur standar dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari kewajiban sebagai lembaga penguji. Padatnya pelayanan ke fasyankes yang menggunakan alat ukur standar memengaruhi terhadap realisasi rekalibrasi.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Karena padatnya pelayanan ke fasyankes yang menggunakan alat ukur standar sehingga realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang direncanakan.

10. Peningkatan Kompetensi SDM

Tabel 30 Analisa Peningkatan Kompetensi SDM

No	Kegiatan Berdasarkan Indikator Sesuai Dengan DIPA	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelatihan Kalibrasi (Lab Suhu dan Volume Gaya Massa)	90,484,000	19,653,500	21.72 %
2	Pelatihan Kalibrasi (Lab Tekanan dan Kelistrikan)	109,386,000	85,579,150	78.24 %
3	Pelatihan Instalasi Sarana Prasarana (Gas Medis, Tata Udara, Perancangan tata udara ruang, dsb)	151,368,000	58,185,411	38.44 %

4	Pelatihan Manajemen dan Mutu Lab TOP dan Yantek (ISO/IEC/Leadership/Business developement/Pelayanan Pelanggan)	271,790,000	168,872,384	62.13 %
5	Pelatihan Instalasi UKPR (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)	220,880,000	132,775,701	60.11 %
6	Pelatihan Instalasi PDP (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)	226,000,000	201,902,051	89.34 %
7	Pelatihan Instalasi AUR (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)	147,320,000	32,190,000	21.85 %
8	Pelatihan Kepegawaian/ Keuangan/ Perencanaan /ICT/ BMN/ Arsiparis	307,580,000	80,795,820	26.27 %
9	Rekualifikasi PPR Tingkat I dan II	38,242,000	3,100,000	8.11 %
10	Pelatihan Sie Pelayanan Teknis (Marketing/Pelayanan Pelanggan/business developement, dsb) on line dan off line	74,124,000	8,150,000	11.00 %
11	Pelatihan Pengujian Uji Produk	111,784,000	89,387,088	79.96 %
12	Pelatihan dan sertifikasi Tingkat Inspektorat IGVM	79,896,000	80,819,095	101.16 %
13	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	47,004,000	84,965,273	180.76 %
14	Uji Kompetensi Kalibrasi	48,224,000	34,899,406	72.37 %

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kegiatan:
Persentase diperoleh dari jumlah SDM BPFK Medan yang mendapatkan pelatihan sedikitnya satu kali selama tahun 2022 dengan pembagi total SDM. Nilai target pada tahun 2022 telah berhasil terpenuhi. Sebagian dari pelatihan dilakukan secara online training.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Terdapat beberapa kegiatan yang biaya kegiatannya lebih rendah dari pagu anggaran pelatihan, sehingga telah dilakukan efisiensi dalam kegiatan tersebut.

3.5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

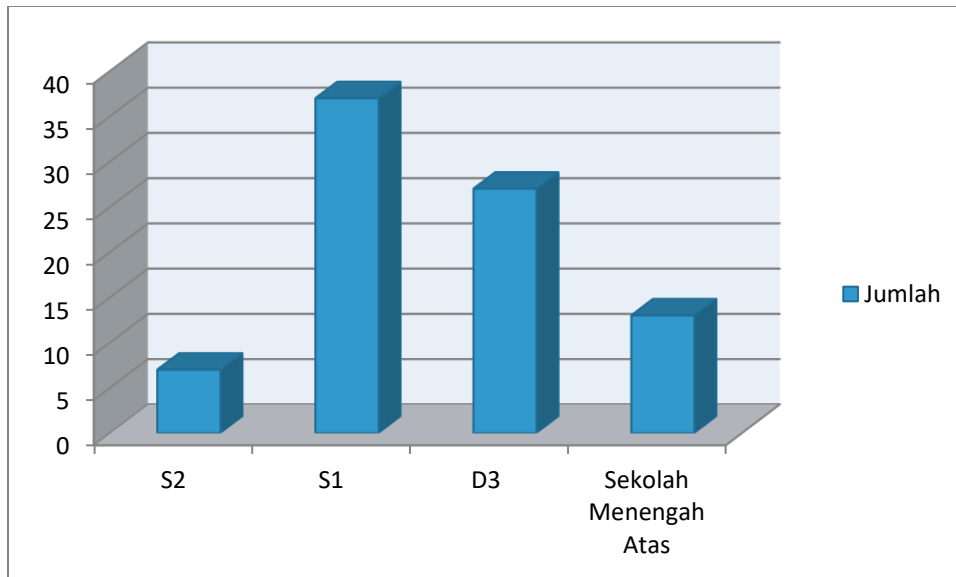
a. Sumber Daya Manusia

1) Pendidikan Formal

Klasifikasi kompetensi pegawai BPFK Medan berdasarkan tingkat Pendidikan dan bidang keahliannya. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 31 Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	7
2	S1	37
3	D3	27
4	Sekolah Menengah Atas	13
Jumlah		81



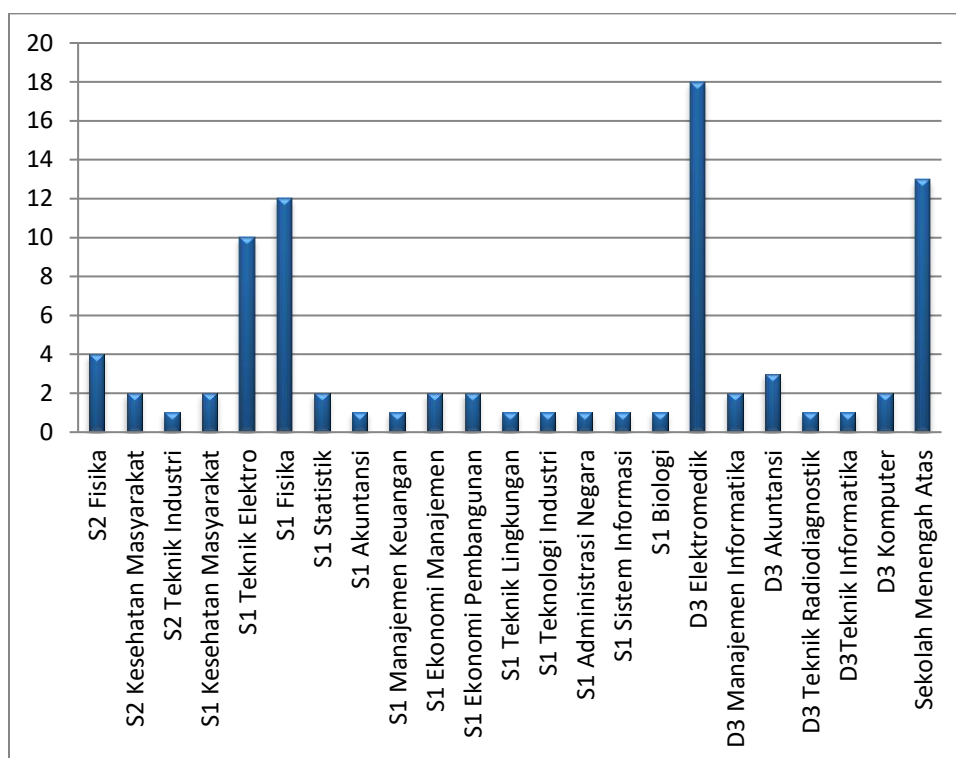
Gambar 1 Grafik Tingkat Pendidikan SDM BPFK Medan

Berikut adalah data detail pegawai BPFK Medan berdasarkan jurusan pendidikannya:

Tabel 32 Jurusan Pendidikan SDM BPFK Medan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2 Fisika	4
2	S2 Kesehatan Masyarakat	2
3	S2 Teknik Industri	1
4	S1 Kesehatan Masyarakat	2
5	S1 Teknik Elektro	10
6	S1 Fisika	12
7	S1 Statistik	2
8	S1 Akuntansi	1
9	S1 Manajemen Keuangan	1
10	S1 Ekonomi Manajemen	2
11	S1 Ekonomi Pembangunan	2
12	S1 Teknik Lingkungan	1
13	S1 Teknologi Industri	1
14	S1 Administrasi Negara	1
15	S1 Sistem Informasi	1
16	S1 Biologi	1
17	D3 Elektromedik	18
18	D3 Manajemen Informatika	2
19	D3 Akuntansi	3

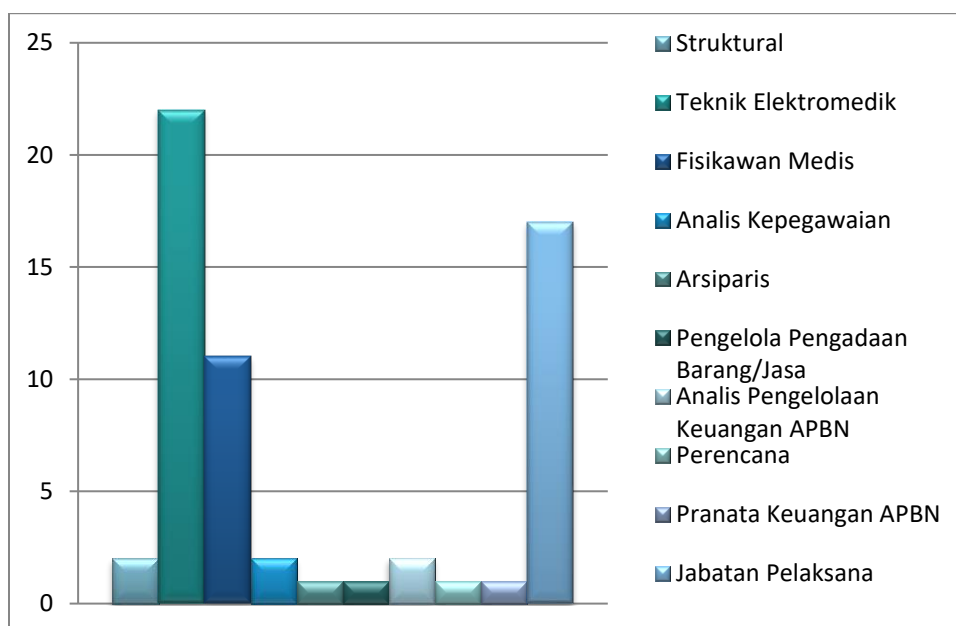
20	D3 Teknik Radiodiagnostik	1
21	D3 Teknik Informatika	1
22	D3 Komputer	2
23	Sekolah Menengah Atas	13
Jumlah		81



Gambar 2 Grafik Jurusan Pendidikan SDM BPFK Medan

2) Peta Jabatan

Jumlah PNS BPFK Medan berdasarkan Jabatan terdiri atas jabatan struktural sebanyak 2 PNS terdiri dari Eselon III sebanyak 1 PNS dan Eselon IV sebanyak 1 PNS, Jabatan Fungsional (JF) Teknik Elektromedik sebanyak 22 PNS, Jabatan Fungsional (JF) Fisikawan Medis sebanyak 11 PNS, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian (JF) sebanyak 2 PNS, Jabatan Fungsional Arsiparis (JF) sebanyak 1 PNS, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF) 1 PNS, Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN (JF) 2 PNS, Jabatan Fungsional Perencana (JF) 1 PNS, Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (JF) 1 PNS dan Jabatan Pelaksana sebanyak 17 PNS, dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



Gambar 3 Grafik Jabatan SDM BPFK Medan

3) Status Pegawai

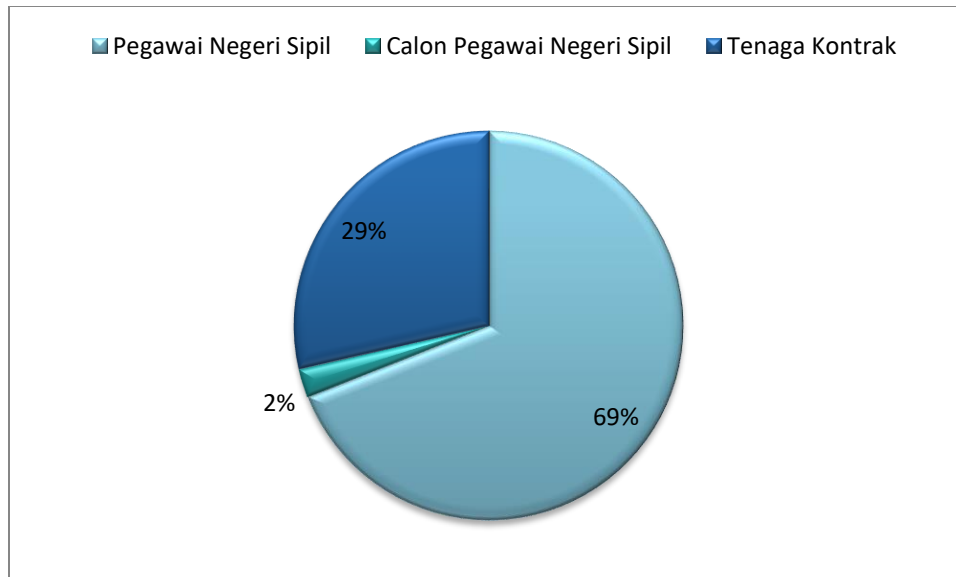
Adapun pegawai BPFK Medan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Jumlah pegawai BPFK Medan adalah 84 orang;
- Jumlah PNS di BPFK Medan sebanyak 58 orang;
- Jumlah CPNS di BPFK Medan sebanyak 2 orang;
- Pegawai Non PNS di BPFK Medan tahun 2022 sebanyak 24 orang.

Data pegawai BPFK Medan berdasarkan status pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Komposisi SDM di BPFK Medan

No.	Status	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	58
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	2
3.	Tenaga Kontrak	24
	Total	84



Gambar 4 Diagram Status Kepegawaian SDM BPFK Medan

b. Sumber Daya Anggaran

Tabel 34 Rincian realisasi belanja

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Jumlah Seluruhnya	23,640,334,000	18,869,837,188	79.82 %
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	7,825,109,000	5,757,822,395	73.58 %
Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	7,825,109,000	5,757,822,395	73.58 %
Pengadaan Alat Kalibrasi	3,238,928,000	2,788,042,001	86.08 %
<u>Pengadaan Alat Kalibrasi/Pengujian/Sarpras</u>	<u>3,238,928,000</u>	<u>2,788,042,001</u>	<u>86.08 %</u>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,238,928,000	2,788,042,001	86.08 %
Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU	2,598,537,000	1,888,505,515	72.68 %
<u>Uji Profisiensi Lab</u>	<u>193,672,000</u>	<u>183,303,490</u>	<u>94.65 %</u>
Belanja Jasa Profesi	19,936,000	14,532,000	72.89 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173,736,000	168,771,490	97.14 %
<u>Penagihan/Tindak lanjut LHP/Sosialisasi Simponi (Tahap I dan Tahap II)</u>	<u>166,800,000</u>	<u>147,204,400</u>	<u>88.25 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166,800,000	147,204,400	88.25 %
<u>Banch Marking Manajemen dan Administrasi</u>	<u>89,040,000</u>	<u>65,759,884</u>	<u>73.85 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89,040,000	65,759,884	73.85 %
<u>Pendampingan Rekalibrasi Alat Kalibrasi/Pengujian/Sarpras Tahap I dan II</u>	<u>132,816,000</u>	<u>110,835,011</u>	<u>83.45 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132,816,000	110,835,011	83.45 %

<u>Survey Kepuasan dan Aseesmen Keluhan Pelanggan Pelayanan Pengujian, Kalibrasi Inspeksi</u>	<u>236,100,000</u>	<u>232,585,447</u>	<u>98.51 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236,100,000	232,585,447	98.51 %
<u>Pelayanan Kalibrasi Alat Medik Puskesmas Daerah Tertinggal/Perbatasan/Kepulauan Terpencil (Riau dan Sumbar)</u>	<u>134,400,000</u>	<u>74,078,332</u>	<u>55.12 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	134,400,000	74,078,332	55.12 %
<u>Uji Banding Instalasi dan Lab UKPR/PDP/AUR</u>	<u>122,700,000</u>	<u>84,549,402</u>	<u>68.91 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,862,000	1,650,000	9.24 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104,838,000	82,899,402	79.07 %
<u>Uji Banding Instalasi dan Lab Kalibrasi</u>	<u>127,128,000</u>	<u>82,264,799</u>	<u>64.71 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,000,000	3,700,000	20.56 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,128,000	78,564,799	71.99 %
<u>Uji Banding Instalasi dan lab Sarpras</u>	<u>45,470,000</u>	<u>12,124,000</u>	<u>26.66 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,470,000	12,124,000	26.66 %
<u>Interkomparasi</u>	<u>159,384,000</u>	<u>80,526,050</u>	<u>50.52 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,000,000	0	0.00 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129,384,000	80,526,050	62.24 %
<u>Bimtek Kalibrasi</u>	<u>332,422,000</u>	<u>195,892,697</u>	<u>58.93 %</u>
Belanja Jasa Profesi	18,000,000	9,000,000	50.00 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	314,422,000	186,892,697	59.44 %
<u>Konsultasi ke Kementerian Kesehatan</u>	<u>228,400,000</u>	<u>166,644,831</u>	<u>72.96 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228,400,000	166,644,831	72.96 %
<u>Kaji Ulang Manajemen Pembahasan Metode Kerja Pegujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (MK Perdirjen) tahun 2022</u>	<u>302,008,000</u>	<u>271,448,086</u>	<u>89.88 %</u>
Belanja Bahan	1,700,000	1,355,290	79.72 %
Belanja Jasa Profesi	13,500,000	8,550,000	63.33 %
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	286,808,000	261,542,796	91.19 %
<u>Konsultasi ke Instansi di luar KEMENKES RI</u>	<u>137,024,000</u>	<u>74,651,791</u>	<u>54.48 %</u>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137,024,000	74,651,791	54.48 %
<u>Hari Kesehatan Nasional</u>	<u>54,384,000</u>	<u>42,861,192</u>	<u>78.81 %</u>
Belanja Bahan	19,000,000	14,400,000	75.79 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,384,000	28,461,192	80.44 %
<u>Kaji Ulang Manajemen dan Audit Dokumen Mutu Internal</u>	<u>75,829,000</u>	<u>63,776,103</u>	<u>84.11 %</u>
Belanja Bahan	2,500,000	2,283,000	91.32 %
Belanja Jasa Profesi	3,000,000	3,000,000	100 %

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70,329,000	58,493,103	83.17 %
Layanan Kepegawaian satker UPT Vertikal	1,987,644,000	1,081,274,879	54.40 %
<u>Pelatihan Kalibrasi (Lab Suhu dan Volume Gaya Massa)</u>	<u>90,484,000</u>	<u>19,653,500</u>	<u>21.72 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	44,800,000	6,600,000	14.73 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,684,000	13,053,500	28.57 %
<u>Pelatihan Kalibrasi (Lab Tekanan dan Kelistrikan)</u>	<u>109,386,000</u>	<u>85,579,150</u>	<u>78.24 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	54,000,000	51,750,000	95.83 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,386,000	33,829,150	61.08 %
<u>Pelatihan Instalasi Sarana Prasarana (Gas Medis, Tata Udara, Perancangan tata udara ruang, dsb)</u>	<u>151,368,000</u>	<u>58,185,411</u>	<u>38.44 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	60,000,000	8,000,000	13.33 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,368,000	50,185,411	54.93 %
<u>Pelatihan Manajemen dan Mutu Lab TOP dan Yantek (ISO/IEC/Leadership/Business developement/Pelayanan Pelanggan)</u>	<u>271,790,000</u>	<u>168,872,384</u>	<u>62.13 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	195,650,000	137,000,000	70.02 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,140,000	31,872,384	41.86 %
<u>Pelatihan Instalasi UKPR (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)</u>	<u>220,880,000</u>	<u>132,775,701</u>	<u>60.11 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	80,000,000	36,000,000	45.00 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140,880,000	96,775,701	68.69 %
<u>Pelatihan Instalasi PDP (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)</u>	<u>226,000,000</u>	<u>201,902,051</u>	<u>89.34 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	80,000,000	66,500,000	83.12 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	146,000,000	135,402,051	92.74 %
<u>Pelatihan Instalasi AUR (Ketidakpastian, ISO 17025, AFISMI, dsb)</u>	<u>147,320,000</u>	<u>32,190,000</u>	<u>21.85 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	32,190,000	80.47 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107,320,000	0	0.00 %
<u>Pelatihan Kepegawaian/Keuangan/ Perencanaan/ ICT/ BMN/Arsiparis</u>	<u>307,580,000</u>	<u>80,795,820</u>	<u>26.27 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	137,500,000	20,650,000	15.02 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170,080,000	60,145,820	35.36 %
<u>Rekualifikasi PPR Tingkat I dan II</u>	<u>38,242,000</u>	<u>3,100,000</u>	<u>8.11 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,980,000	3,100,000	77.89 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,262,000	0	0.00 %
<u>Pelatihan Sie Pelayanan Teknis (Marketing/ Pelayanan Pelanggan/ business developement,dsb) on line dan off line</u>	<u>74,124,000</u>	<u>8,150,000</u>	<u>11.00 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	28,440,000	8,150,000	28.66 %

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,684,000	0	0.00 %
Pelatihan Pengujian Uji Produk	111,784,000	89,387,088	79.96 %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	48,000,000	40,000,000	83.33 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,784,000	49,387,088	77.43 %
Pelatihan dan sertifikasi Tingkat Inspektorat IGVM	79,896,000	80,819,095	101.16 %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	54,000,000	54,000,000	100 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,896,000	26,819,095	103.56 %
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	47,004,000	84,965,273	180.76 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,004,000	84,965,273	180.76 %
Uji Kompetensi Kalibrasi	48,224,000	34,899,406	72.37 %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	0.00 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,224,000	34,899,406	77.17 %
Gaji dan Tunjangan	8,564,758,000	7,999,945,108	93.41 %
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8,564,758,000	7,999,945,108	93.41 %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,972,603,000	2,785,835,415	93.72 %
Belanja Pembulatan Gaji PNS	46,000	35,733	77.68 %
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	177,000,000	184,236,120	104.09 %
Belanja Tunj. Anak PNS	73,711,000	65,119,514	88.34 %
Belanja Tunj. Struktural PNS	26,200,000	23,400,000	89.31 %
Belanja Tunj. Fungsional PNS	241,389,000	51,585,000	21.37 %
Belanja Tunj. PPh PNS	11,751,000	9,044,828	76.97 %
Belanja Tunj. Beras PNS	187,539,000	163,234,680	87.04 %
Belanja Uang Makan PNS	462,603,000	344,613,000	74.49 %
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	670,000,000	732,041,193	109.26 %
Belanja Tunj. Umum PNS	170,820,000	118,060,000	69.11 %
Belanja Uang Lembur	18.800.000	0	0%
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3,552,296,000	3,522,739,625	99.17 %
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7,246,356,000	5,108,129,685	70.49 %
Belanja Langganan Daya dan Jasa	1,342,045,000	870,965,633	64.90 %
Belanja Langganan Listrik	264.000.000	193,595,252	73.33 %
Belanja Langganan Telepon	48.000.000	24,321,732	50.67 %
Belanja Langganan Air	18.000.000	2,846,610	15.81 %
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	252,300,000	235,163,259	93.21 %
Belanja Langganan Pos dan Giro	240.000.000	194,975,200	81.24 %
Belanja Sewa	45,877,000	45,000,000	98.09 %
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	473,868,000	175,063,580	36.94 %
Belanja Pemeliharaan Halaman dan Bangunan Gedung Kantor	212.782.000	212,425,000	99.83 %

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	212.782.000	212,425,000	99.83 %
<u>BELANJA PEMELIHARAAN / REKALIBRASI/ PERBAIKAN PERALATAN KANTOR, ALAT UKUR UJI, KALIBRASI INSPEKSI</u>	<u>2,009,501,000</u>	<u>826,929,426</u>	<u>41.15 %</u>
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,991,501,000	810,929,426	40.72 %
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	18,000,000	16,000,000	88.89 %
<u>Belanja Pemeliharaan/Perawatan kendaraan Roda 2 dan Roda 4</u>	<u>216.120.000</u>	<u>194,576,874</u>	<u>90.03 %</u>
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.120.000	194,576,874	90.03 %
<u>Belanja Operasional Keperluan Perkantoran</u>	<u>1,147,150,000</u>	<u>1,059,465,150</u>	<u>92.36 %</u>
Belanja Keperluan Perkantoran	450,020,000	365,250,400	81.16 %
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	300,000,000	299,400,000	99.80 %
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	397,130,000	394,814,750	99.42 %
<u>Belanja Honor Operasi Satuan Kerja</u>	<u>1,149,650,000</u>	<u>1,079,303,750</u>	<u>93.88 %</u>
Belanja Honor Operasi Satuan Kerja	1,149,650,000	1,079,303,750	93.88 %
<u>Pemeriksaan Kesehatan Pegawai/Resiko Pekerjaan</u>	<u>129,000,000</u>	<u>128,570,000</u>	<u>99.67 %</u>
Belanja Barang Operasional Lainnya	129,000,000	128,570,000	99.67 %
<u>PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PEGAWAI</u>	<u>212,040,000</u>	<u>0</u>	<u>0.00 %</u>
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	212,040,000	0	0.00 %
<u>PERTEMUAN KEUANGAN, PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, HUMAS, ARSIPARIS, ICT, KETATAUSAHAAN, KERUMAHTANGGAAN</u>	<u>468,300,000</u>	<u>442,991,425</u>	<u>94.60 %</u>
Belanja Perjalanan Biasa	468,300,000	442,991,425	94.60 %
<u>PERJALANAN DINAS PIMPINAN</u>	<u>282,024,000</u>	<u>257,595,407</u>	<u>91.34 %</u>
Belanja Perjalanan Biasa	282,024,000	257,595,407	91.34 %
<u>Permohonan Akreditasi</u>	<u>43,528,000</u>	<u>26,992,520</u>	<u>62.01 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	13,200,000	48.00 %
Belanja Perjalanan Biasa	16,028,000	13,792,520	86.05 %
<u>Surveylen Akreditasi</u>	<u>34,216,000</u>	<u>8,314,500</u>	<u>24.30 %</u>
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	5,404,500	54.05 %
Belanja Perjalanan Biasa	24,216,000	2,910,000	12.02 %
Pengadaan Inventaris Kantor	4,111,000	3,940,000	95.84 %
<u>Pengadaan Inventaris Kantor</u>	<u>4,111,000</u>	<u>3,940,000</u>	<u>95.84 %</u>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,111,000	3,940,000	95.84 %

Tabel 35 Realisasi Belanja per jenis Belanja BPFK Medan Tahun 2022

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	024-621949	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN	004	PAGU	8,564,758,000	11,832,537,000	3,243,039,000	0	0	0	0	0	0	23,640,334,000
				REALISASI	7,999,945,108	7,952,310,079	2,791,982,001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18,744,237,188
				PERSENTASE	(93.41%)	(67.21%)	(86.09%)							(79.29%)
				SISA	564,812,892	3,880,226,921	451,056,999	0	0	0	0	0	0	4,896,096,812
TOTAL				PAGU	8,564,758,000	11,832,537,000	3,243,039,000	0	0	0	0	0	0	23,640,334,000
				REALISASI	7,999,945,108	7,952,310,079	2,791,982,001	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	18,744,237,188
				PERSENTASE	(93.41%)	(67.21%)	(86.09%)							(79.29%)
				SISA	564,812,892	3,880,226,921	451,056,999	0	0	0	0	0	0	4,896,096,812

c. Sarana dan Prasarana

Pencapaian peningkatan dari segi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan layanan yang ditunjukkan dengan adanya penambahan fasilitas perkantoran, fasilitas laboratorium, armada transportasi serta alat.

Tabel 36 Neraca Sarana dan Prasarana

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	635.690.973	0,75%		0,00%	635.690.973	0,75%
	Sub Jumlah (1)	635.690.973	0,75%	0	0,00%	635.690.973	0,75%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0,00%		0,00%		0,00%
2	Peralatan dan Mesin	76.974.026.579	91,30%	42.099.800	100,00%	77.016.126.379	91,30%
3	Gedung dan Bangunan	5.787.188.000	6,86%		0,00%	5.787.188.000	6,86%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	295.162.000	0,35%		0,00%	295.162.000	0,35%
5	Aset Tetap Lainnya	25.552.060	0,03%		0,00%	25.552.060	0,03%
6	KDP		0,00%		0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah (2)	83.081.928.639	98,54%	42.099.800	100,00%	83.124.028.439	98,54%
III	Aset Lainnya						
1	Software	591.800.000	0,70%		0,00%	591.800.000	0,70%
2	Aset Tak Berwujud		0,00%		0,00%	0	0,00%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah		0,00%		0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah (3)	591.800.000	0,70%	0	0,00%	591.800.000	0,70%
	Total	84.309.419.612		42.099.800		84.351.519.412	

Tabel 37 Sarana dan Prasarana di BPFK Medan

No.	Sarana	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Tanah	M ²	0	
2.	Gedung/Bangunan	M ²	862	
3.	Peralatan dan Mesin	Unit	1.863	
4.	Jaringan	Unit	4	
5.	Aset tetap Lainnya	Unit	294	

BAB IV PENUTUP

LAKIP BPFK Medan ini menunjukkan pencapaian kinerja BPFK Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu dari Bulan Januari–Desember 2022 yang bertugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta di 7 (tujuh) wilayah kerja yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Bengkulu.

Tahun 2022 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh masing-masing bagian dan bidang, kegiatan-kegiatan tersebut mencakup bagian ketatausahaan, bidang pelayanan dan bidang tata operasional pada BPFK Medan. Salah satu unsur penting dalam penilaian organisasi adalah kinerja aparatur yang diaktualisasikan dengan perencanaan program yang tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan.

Realisasi anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.869.837.188,- atau mencapai 79,82 % dari PAGU Anggaran sebesar Rp. 23.640.334.000,- dan untuk Realisasi pendapatan BPFK Medan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.240.595.041,- atau 117 % yang pencapaiannya melebihi dari targetnya sebesar Rp5.342.708.000,- yang ditargetkan di penetapan kinerja.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan antara lain adalah :

1. Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak terjadi revisi
2. Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Kemampuan (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia yang memadai
5. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan
6. Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun tahun mendatang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2022 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan dimasa yang akan datang.